



**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
SALINAN**

**KEPUTUSAN  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 298 TAHUN 2024**

**TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2024  
TENTANG PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS  
RISIKO INSPEKTORAT LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2024**

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya penyesuaian terhadap Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Tahun 2024, perlu melakukan perubahan dan penyempurnaan terhadap Lampiran IV Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 48 Tahun 2024 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 48 Tahun 2024 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 898);
3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2024 TENTANG PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RISIKO INSPEKTORAT LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2024.

KESATU : Lampiran IV dalam Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 48 Tahun 2024 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2024, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Desember 2024  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. Kepala Biro Hukum, Organisasi dan

Sumber Daya Manusia LKPP,



Rinaldi Morintosh

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2024 TENTANG PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RISIKO INSPEKTORAT LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2024

NOMOR : 298 TAHUN 2024

TANGGAL : 17 Desember 2024

**PERUBAHAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RISIKO INSPEKTORAT LKPP TAHUN 2024**

No	Jenis Pengawasan/Judul Pengawasan	Auditi/Klien	Jumlah Auditor Per Kegiatan	Hari Pengawasan Per Kegiatan	Frekuensi Kegiatan	Rencana Waktu Pengawasan	Realisasi Waktu Pengawasan (sampai dengan Triwulan III)	Keluaran	Keterangan Perubahan
<b>A. KEGIATAN PENGAWASAN INTERN</b>									
<b>1</b>	<b>Audit</b>								
1.1	Audit Internal Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2024 di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)	Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah c.q. 1. Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital 2. Kepala Pusat Data dan Informasi	6	112	1	Maret	Mei	Laporan	Dilakukan penyesuaian judul pengawasan, karena terdapat perubahan ruang lingkup penugasan. Rencana penugasan sebelumnya berjudul "Audit Internal Teknologi Informasi dan Komunikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah"
1.2	Audit Kinerja atas Pelaksanaan Probitiy Advice atau Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa pada Kedutaan Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah.	Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah	6	20	1	September	-	Laporan	Dilakukan penyesuaian judul pengawasan, karena terdapat perubahan ruang lingkup penugasan, sebelumnya berjudul "Audit Kinerja atas Pelaksanaan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa pada Kedeputusan Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah"

1.3	Audit Kinerja atas Pelaksanaan Layanan Biro Hubungan Masyarakat dan Umum	Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Umum	7	76	1	Maret	Maret	Laporan	-
<b>JUMLAH KEGIATAN AUDIT</b>			<b>19</b>	<b>208</b>	<b>3</b>				
<b>2</b>	<b>Reviu</b>								
2.1	Reviu atas Usulan Rencana Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2025	Sekretaris Utama	5	43	1	Februari	April	Laporan	Dilakukan penyesuaian judul pengawasan, rencana penugasan sebelumnya berjudul "Reviu atas Rencana Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2024"
2.2	Reviu atas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2025	Sekretaris Utama	6	33	1	April	Mei	Laporan	Dilakukan penyesuaian judul pengawasan, rencana penugasan sebelumnya berjudul "Reviu atas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2024"
2.3	Reviu atas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Pagu Alokatif Tahun Anggaran 2025	Sekretaris Utama	5	15	1	September	September	Laporan	Dilakukan penyesuaian judul pengawasan, rencana penugasan sebelumnya berjudul "Reviu atas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Pagu Alokatif Tahun Anggaran 2024"
2.4	Reviu atas Usulan Revisi Anggaran dalam Pembukaan Blokir Anggaran Tahun Anggaran 2024	Sekretaris Utama	6	5	1	Januari	Januari	Laporan	Dilakukan perubahan judul pengawasan, karena perbedaan ruang lingkup berdasarkan permintaan dari Unit Organisasi terkait, rencana penugasan sebelumnya berjudul "Reviu atas DIPA LKPP Tahun Anggaran 2024"
2.5	Reviu atas Revisi Pembukaan Blokir atas Pencadangan Anggaran ( <i>Automatic Adjustment</i> ) pada DIPA LKPP TA 2024	Sekretaris Utama	4	10	1	Mei	September	Laporan	Dilakukan perubahan judul pengawasan, karena perbedaan ruang lingkup berdasarkan permintaan dari Unit Organisasi terkait, rencana penugasan sebelumnya berjudul "Reviu atas DIPA LKPP Tahun Anggaran 2024"
2.6	Reviu Alokasi atas Anggaran Perjalanan Dinas Unit Organisasi LKPP TA 2024	Sekretaris Utama	5	10	1	Juli	-	Laporan	Dilakukan perubahan judul pengawasan, karena perbedaan ruang lingkup berdasarkan permintaan dari Unit Organisasi terkait, sebelumnya berjudul "Reviu atas DIPA LKPP Tahun Anggaran 2024"
2.7	Reviu atas Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) Tahun Anggaran 2026	Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Umum	5	15	1	September	September	Laporan	-

2.8	Reviu atas Laporan Kinerja (LKJ) Unit Organisasi Eselon I dan II Mandiri LKPP Tahun 2023	Seluruh Pejabat Eselon I dan II Mandiri	6	20	1	Januari	Januari	Laporan	-
2.9	Reviu atas Laporan Kinerja (LKJ) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2023	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan	5	19	1	Januari	Februari	Laporan	-
2.10	Reviu atas Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa (PAPBJ) LKPP Periode Triwulan I Tahun Anggaran 2024	Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	6	28	1	Maret	Maret	Laporan	-
2.11	Reviu atas Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa (PAPBJ) LKPP Periode Triwulan II Tahun Anggaran 2024	Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	6	28	1	Juni	Maret	Laporan	-
2.12	Reviu atas Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa (PAPBJ) LKPP Periode Triwulan III Tahun Anggaran 2024	Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	6	20	1	September	September	Laporan	-
2.13	Reviu atas Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa (PAPBJ) LKPP Periode Triwulan IV Tahun Anggaran 2024	Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	6	10	1	Desember	-	Laporan	-
2.14	Reviu atas Laporan Keuangan dan Laporan Barang Milik Negara Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2023 ( <i>Unaudited</i> )	1. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan 2. Sekretaris Utama	9	44	1	Januari	Januari	Laporan	Dilakukan penyesuaian judul pengawasan, rencana penugasan sebelumnya berjudul "Reviu atas Laporan Keuangan & Laporan Barang Milik Negara LKPP Tahun Anggaran 2023 ( <i>Unaudited</i> )"
2.15	Reviu atas Laporan Keuangan & Laporan Barang Milik Negara LKPP Tahun Anggaran 2023 ( <i>Audited</i> )	1. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan 2. Sekretaris Utama	7	41	1	Mei	April	Laporan	-
2.16	Reviu atas Laporan Keuangan & Laporan Barang Milik Negara LKPP Semester I Tahun Anggaran 2024	Sekretaris Utama	5	60	1	Juli	Juli	Laporan	-
2.17	Reviu atas Laporan Keuangan LKPP Triwulan III Tahun Anggaran 2024	Sekretaris Utama	6	30	1	Oktober	-	Laporan	Dilakukan penyesuaian judul pengawasan, karena objek pengawasan hanya pada Laporan Keuangan, rencana penugasan sebelumnya berjudul "Reviu atas Laporan Keuangan & Laporan Barang Milik Negara LKPP Triwulan III Tahun Anggaran 2024"

2.18	Reviu atas Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Tahun 2023	Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia	5	18	1	Januari	Februari	Laporan	-
2.19	Reviu Penerimaan Pajak atas Belanja Pemerintah dan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tahun anggaran 2023	Sekretaris Utama	5	27	1	Januari	Januari	Laporan	Dilakukan penyesuaian judul pengawasan, rencana penugasan sebelumnya berjudul "Reviu Penerimaan Pajak atas Belanja Pemerintah dan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun Anggaran 2023"
2.20	Reviu atas Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dalam Sistem Purchasing Semester II Tahun Anggaran 2023	Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	5	27	1	Januari	Januari	Laporan	-
2.21	Reviu atas Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Semester I Tahun Anggaran 2024	Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	7	38	1	Juli	Juli	Laporan	Dilakukan penyesuaian judul pengawasan, karena karena terdapat penambahan objek pada ruang lingkup pengawasan, rencana penugasan sebelumnya berjudul "Reviu atas Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dalam Sistem <i>Purchasing</i> Semester I Tahun Anggaran 2024"
2.22	Reviu atas Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa dan Pelaksana Ujian PBJ	1. Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia 2. Kepala Pusat Pelatihan SDM Pengadaan Barang/Jasa	7	40	1	Maret	Maret	Laporan	-
2.23	Reviu atas Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Percepatan Transformasi Digital di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sampai Dengan Semester I Tahun 2024	Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah c.q. Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital	6	30	1	Juli	-	Laporan	Dilakukan perubahan judul dan jenis pengawasan, karena terdapat perubahan ruang lingkup pengawasan, rencana penugasan sebelumnya berjudul "Audit Dengan Tujuan Tertentu atas Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital Dibidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah"
<b>JUMLAH KEGIATAN REVIU</b>			<b>133</b>	<b>611</b>	<b>23</b>				

3	Evaluasi								
3.1	Evaluasi Internal Atas Rreformasi Birokrasi Tematik Dan Reformasi Birokrasi General Tahap Perencanaan (Ex-Ante) di Lingkungan LKPP Tahun 2024	Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	5	6	1	Maret	April	Laporan	Dilakukan penyesuaian judul pengawasan, karena terdapat penyesuaian periode pengawasan, rencana penugasan sebelumnya berjudul "Evaluasi atas Reformasi Birokrasi Tematik dan Reformasi Birokrasi General di Lingkungan LKPP Periode Triwulan I Tahun 2024"
3.2	Evaluasi atas Reformasi Birokrasi General dan Tematik di Lingkungan LKPP Periode Triwulan I Tahun 2024	Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	5	6	1	Juni	Juni	Laporan	Dilakukan penyesuaian judul pengawasan, karena terdapat penyesuaian periode pengawasan, rencana penugasan sebelumnya berjudul "Evaluasi atas Reformasi Birokrasi Tematik dan Reformasi Birokrasi General di Lingkungan LKPP Periode Triwulan II Tahun 2024"
3.3	Evaluasi atas Reformasi Birokrasi General dan Tematik di Lingkungan LKPP Periode Triwulan II Tahun 2024	Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	5	6	1	Juni	Juni	Laporan	Dilakukan penyesuaian judul pengawasan, karena terdapat penyesuaian periode pengawasan, rencana penugasan sebelumnya berjudul "Evaluasi atas Reformasi Birokrasi Tematik dan Reformasi Birokrasi General di Lingkungan LKPP Periode Triwulan III Tahun 2024"
3.4	Evaluasi atas Reformasi Birokrasi Tematik dan Reformasi Birokrasi General di Lingkungan LKPP Periode Triwulan III Tahun 2024	Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	5	15	1	September	-	Laporan	Dilakukan penyesuaian judul pengawasan, karena terdapat penyesuaian periode pengawasan, rencana penugasan sebelumnya berjudul "Evaluasi atas Reformasi Birokrasi Tematik dan Reformasi Birokrasi General di Lingkungan LKPP Periode Triwulan IV Tahun 2024"
3.5	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024 atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2023 pada Kedeputan Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan	3	74	1	Mei	Juli	Laporan	Dilakukan penyesuaian judul pengawasan, karena terdapat penyesuaian periode pengawasan, rencana penugasan sebelumnya berjudul "Evaluasi atas Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pada Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan"
3.6	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024 atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi	Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital	3	74	1	Mei	Juli	Laporan	Dilakukan penyesuaian judul pengawasan, karena terdapat penyesuaian periode pengawasan, rencana penugasan sebelumnya berjudul "Evaluasi atas Implementasi



	Pemerintah (SAKIP) tahun 2023 pada Kedeputan Bidang Transformasi Pengadaan Digital Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah								Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pada Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital"
3.7	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024 atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2023 pada Kedeputan Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.	Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia	3	79	1	Mei	Juli	Laporan	Dilakukan penyesuaian judul pengawasan, karena terdapat penyesuaian periode pengawasan, rencana penugasan sebelumnya berjudul "Evaluasi atas Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pada Kedeputan Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia"
3.8	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024 atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2023 pada Kedeputan Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.	Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	3	69	1	Mei	Juli	Laporan	Dilakukan penyesuaian judul pengawasan, karena terdapat penyesuaian periode pengawasan, rencana penugasan sebelumnya berjudul "Evaluasi atas Implementasi Evaluasi atas Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pada Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah"
3.9	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024 atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2023 pada Sekretariat Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.	Sekretaris Utama	4	111	1	Mei	Maret	Laporan	Dilakukan penyesuaian judul pengawasan, karena terdapat penyesuaian periode pengawasan, rencana penugasan sebelumnya berjudul "Evaluasi atas Implementasi Evaluasi atas Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pada Sekretariat Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah"
3.10	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024 atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2023 pada Pusat Data dan Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah.	Kepala Pusat Data dan Informasi	4	121	1	Mei	Maret	Laporan	Dilakukan penyesuaian judul pengawasan, karena terdapat penyesuaian periode pengawasan, rencana penugasan sebelumnya berjudul "Evaluasi atas Implementasi Evaluasi atas Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pada Pusat Data dan Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah"

3.11	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024 atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2023 pada Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.	Kepala Pusat Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa	3	76	1	Mei	Juli	Laporan	Dilakukan penyesuaian judul pengawasan, karena terdapat penyesuaian periode pengawasan, rencana penugasan sebelumnya berjudul "Evaluasi atas Implementasi Evaluasi atas Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pada Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah"
3.12	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024 atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2023 pada Inspektorat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.	Inspektur Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	3	79	1	Mei	Juli	Laporan	Dilakukan penyesuaian judul pengawasan, karena terdapat penyesuaian periode pengawasan, rencana penugasan sebelumnya berjudul "Evaluasi atas Implementasi Evaluasi atas Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pada Inspektorat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah"
3.13	Evaluasi Kontrak <i>Facility Management</i>	Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital	6	20	1	Maret	-	Laporan	Dilakukan perubahan judul dan jenis pengawasan, karena belum terdapat pelaksanaan PNBP di LKPP pada Tahun 2024, rencana penugasan sebelumnya berjudul "Reviu Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas Kerjasama PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Periode Triwulan I Tahun 2024"
<b>JUMLAH KEGIATAN EVALUASI</b>			<b>52</b>	<b>736</b>	<b>13</b>				
<b>4</b>	<b>Pemantauan</b>								
4.1	Pemantauan atas Pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi B12 Tahun 2024 di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah c.q. Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital	5	5	1	Januari	Januari	Laporan	-
4.2	Pemantauan atas Pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi B15 Tahun 2024 di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah c.q. Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital	5	5	1	April	April	Laporan	-

4.3	Pemantauan atas Pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi B18 Tahun 2024 di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah c.q. Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital	4	5	1	Juni	Juli	Laporan	-
4.4	Pemantauan atas Pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi B21 Tahun 2024 di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah c.q. Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital	5	5	1	Oktober	-	Laporan	-
4.5	Pemantauan atas Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Semester I Tahun Anggaran 2024	Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	5	10	1	Juni	Juli	Laporan	-
4.6	Pemantauan atas Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Semester II Tahun Anggaran 2024	Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	5	10	1	Desember		Laporan	-
4.7	Pemantauan atas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Semester I Tahun Anggaran 2024	Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	5	15	1	Juni	Juni	Laporan	-
4.8	Pemantauan atas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Semester II Tahun Anggaran 2024	Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	5	15	1	November	-	Laporan	-
4.9	Pemantauan atas Penanganan Pengaduan berkadar Pengawasan di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Periode Triwulan IV Tahun Anggaran 2023	Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	5	5	1	Januari	Januari	Laporan	-
4.10	Pemantauan atas Penanganan Pengaduan berkadar Pengawasan di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Periode Triwulan I Tahun Anggaran 2024	Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	5	5	1	April	April	Laporan	-

4.11	Pemantauan atas Penanganan Pengaduan berkadar Pengawasan di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Periode Triwulan II Tahun Anggaran 2024	Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	3	5	1	Juli	Juni	Laporan	-
4.12	Pemantauan atas Penanganan Pengaduan berkadar Pengawasan di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Periode Triwulan III Tahun Anggaran 2024	Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	3	5	1	Oktober	-	Laporan	-
4.13	Pemantauan atas Penanganan Pelaporan Gratifikasi di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Periode Triwulan IV Tahun Anggaran 2023	Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	4	3	1	Januari	Januari	Laporan	-
4.14	Pemantauan atas Penanganan Pelaporan Gratifikasi di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Periode Triwulan I Tahun Anggaran 2024	Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	5	5	1	April	April	Laporan	-
4.15	Pemantauan atas Penanganan Pelaporan Gratifikasi di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Periode Triwulan II Tahun Anggaran 2024	Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	4	5	1	Juli	Juli	Laporan	-
4.16	Pemantauan atas Penanganan Pelaporan Gratifikasi di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Periode Triwulan III Tahun Anggaran 2024	Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	4	5	1	Oktober	-	Laporan	-
4.17	Pemantauan atas Pelaksanaan Kewajiban Penyampaian LHKAN Pejabat/Pegawai Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2023	Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	5	5	1	Maret	Maret	Laporan	-
4.18	Pemantauan atas Aset Tetap dengan Kondisi Rusak Ringan dan Rusak Berat di LKPP	Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital	5	30	1	September	September	Laporan	Dilakukan perubahan judul dan jenis pengawasan, karena belum terdapat pelaksanaan PNBP pada tahun 2024 serta penyesuaian ruang lingkup dan objek pengawasan. Rencana penugasan sebelumnya berjudul "Reviu Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas Kerjasama

									PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah periode Triwulan III Tahun 2024"
<b>JUMLAH KEGIATAN PEMANTAUAN</b>			<b>82</b>	<b>143</b>	<b>18</b>				
<b>JUMLAH A</b>			<b>286</b>	<b>1.698</b>	<b>57</b>				
<b>B. KONSULTANSI</b>									
5.1	Tim Penilai Internal Unit Organisasi Zona Integritas Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2024	Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	6	25	1	Mei	Juni	Laporan	-
5.2	Pendampingan atas Kegiatan Pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Tahun Anggaran 2023	Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah c.q. Sekretaris Utama	7	61	1	Februari	Februari	Laporan	Dilakukan penyesuaian judul pengawasan, rencana penugasan sebelumnya Pengawasan berjudul "Pendampingan atas Kegiatan Pemeriksaan BPK Terhadap Laporan Keuangan LKPP Tahun Anggaran 2023"
5.3	Penilaian Mandiri Kapabilitas Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2024	Inspektur Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	7	24	1	Maret	Mei	Laporan	-
5.4	Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegritas di Lingkungan LKPP	Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	6	12	1	April	-	Laporan	-
5.5	Pengawasan atas Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) LKPP Tahun Anggaran 2024 pada Tahapan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)	Sekretaris Utama	23	35	1	Desember	-	Laporan	Dilakukan perubahan judul dan Jenis pengawasan, karena belum terdapat pelaksanaan PNBP pada Tahun 2024 serta dilakukan perubahan ruang lingkup dan objek pengawasan. Rencana penugasan sebelumnya berjudul "Reviu Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas Kerjasama PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Periode Triwulan IV tahun 2024".
5.6	Pendampingan atas Pelaksanaan Pengadaan Sistem Tata Udara di LKPP	Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital	6	64	1	Juni	September	Laporan	Dilakukan perubahan judul dan jenis pengawasan, karena belum terdapat pelaksanaan PNBP pada Tahun 2024 serta dilakukan perubahan ruang lingkup dan objek pengawasan. Rencana penugasan

									sebelumnya berjudul "Reviu penerimaan negara bukan pajak (PNBP) atas kerjasama PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah periode triwulan II tahun 2024".
5.7	Pengawasan atas Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) LKPP Tahun Anggaran 2024 pada Tahapan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)	Sekretaris Utama	5	10	1	Juli	-	Laporan	Dilakukan perubahan judul dan jenis pengawasan, karena tidak adanya permintaan dari Unit Organisasi terkait lingkup penugasan yang sebelumnya serta dilakukan perubahan atas ruang lingkup dan objek pengawasan. Rencana penugasan sebelumnya berjudul "Reviu atas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Pagu Anggaran Tahun Anggaran 2024".
<b>JUMLAH B</b>			<b>60</b>	<b>231</b>	<b>7</b>				
<b>C. NON PENGAWASAN INTERN</b>									
<b>6</b>	<b>Perencanaan Pengawasan Intern</b>								
6.1	Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Tahun Anggaran 2025	Inspektur Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	5	20	1	November	-	Laporan	-
<b>JUMLAH C</b>			<b>5</b>	<b>20</b>	<b>1</b>				
<b>JUMLAH A + B + C</b>			<b>351</b>	<b>1.949</b>	<b>65</b>				

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI